

**DIPLOMASI IKLIM DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM SENGKETA
GERD: STUDI KASUS ETHIOPIA, SUDAN, DAN MESIR**

Vanya Anindita¹, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Universitas Hasanuddin

vanyaanindita75264@gmail.com¹, imamfadhil86@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di Sungai Nil melibatkan Ethiopia, Mesir, dan Sudan yang memunculkan ketegangan geopolitik akibat kepentingan nasional masing-masing negara. Dengan berfokus pada dampak-dampak ekologis yang disebabkan oleh pembangunan bendungan ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak eksternal seperti Amerika Serikat dan Bank Dunia, serta organisasi regional yaitu Uni Afrika dalam membentuk sebuah diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan kolektif bagi ketiga negara. Kasus ini berfokus pada kepentingan nasional dari masing-masing negara, Ethiopia dengan kepentingan industrialisasi sementara Mesir dan Sudan dengan kepentingan keamanan lingkungannya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data berupa analisis konten dari artikel jurnal penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik GERD dan situs-situs formal yang dinilai dapat mendukung data dari penelitian ini. Penelitian ini menganalisis dampak lingkungan dan sosial GERD menggunakan teori keamanan lingkungan, mengevaluasi ketimpangan distribusi air, serta konsekuensi politik dan ekologi bagi ketiga negara. Konflik ini menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya air lintas batas yang adil untuk mencegah eskalasi konflik dan mendukung stabilitas regional.

Kata Kunci: GERD, Keamanan Lingkungan, Diplomasi Iklim.

Abstract

This study examines the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) dispute on the Nile River involving Ethiopia, Egypt, and Sudan which has raised geopolitical tensions due to the national interests of each country. By focusing on the ecological impacts caused by the construction of this dam and the efforts made by external parties such as the United States and the World Bank,

as well as regional organizations, namely the African Union, in forming a discussion and negotiation to reach a collective agreement for the three countries. This case focuses on the national interests of each country, Ethiopia with its industrialization interests while Egypt and Sudan with their environmental security interests. This study will use a qualitative approach with data analysis techniques in the form of content analysis of journal articles of previous studies related to the GERD conflict and formal sites that are considered to be able to support the data from this study. This study analyzes the environmental and social impacts of GERD using environmental security theory, evaluating the inequality of water distribution, and the political and ecological consequences for the three countries. This conflict highlights the need for equitable management of transboundary water resources to prevent conflict escalation and support regional stability.

Keywords: GERD, Environmental Security, Climate Diplomacy.

PENDAHULUAN

Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia menjadi sumber kehidupan vital bagi masyarakat Afrika mulai dari kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan air untuk kegiatan pertanian hingga kebutuhan daya listrik (Purnomo, 2022). Dengan panjang hingga lebih dari 6000 kilometer, Sungai Nil memiliki beberapa *riparian states* atau negara-negara yang berbatasan langsung yaitu Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. (Purnomo, 2022) Dikelilingi banyak negara, penganut aliran liberalisme percaya bahwa perlu adanya kerja sama ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dan mencegah terjadinya konflik. Untuk memfasilitasi hal ini *Nile Basin Initiative* (NBI) muncul pada tahun 1999. NBI menjadi wadah untuk kerja sama antar negara untuk memanfaatkan sungai Nil dengan sah. Dibalik posisi Sungai Nil yang strategis, tentunya akan ada konflik yang terjadi karena latar belakang kepentingan dan ego negara (Purnomo, 2022).

Di wilayah tanduk Afrika, Mesir dan Sudan menandatangani sebuah perjanjian bilateral yang dinamakan *The 1959 Nile Waters Agreement*. Perjanjian ini menyatakan kekuasaan Mesir dan Sudan atas Sungai Nil sebagai sumber kehidupan masing-masing masyarakat. Atas perjanjian ini, Mesir mendapatkan hak secara alami dan historis atas Sungai Nil dan mendapatkan hak veto atas pembangunan-pembangunan yang dapat memberikan pengaruh

pada air Nil (Toufexi, C, 2025). Perjanjian ini dibentuk untuk meningkatkan alokasi air ke Mesir menjadi 55 miliar meter kubik dan Sudan menjadi 18,5 miliar meter kubik (Mbaku, 2020). Meningkatnya populasi di negara-negara riparian, mulai muncul proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan nasional. Hal ini tentunya ditolak keras oleh Mesir karena telah melanggar Perjanjian 1959 yang juga menyatakan bahwa semua pembangunan yang dilakukan di perairan Nil harus mendapatkan persetujuan dari Kairo. Atas dasar kepemilikan hak veto, Mesir memiliki kekuasaan penuh atas proyek-proyek di perairan Nil. Tetapi negara-negara riparian lainnya memandang bahwa perjanjian 1959 memaksakan mereka untuk tunduk kepada perintah Kairo yang mana tidak seiring dengan status negara merdeka sebagai negara berdaulat yang merdeka. Berbagai perjanjian yang telah dilakukan dengan alasan untuk mengatur Sungai Nil dan pembagian hak atas sungai tersebut tidak diakui oleh negara-negara riparian dan hanya dianggap sebagai “perjanjian kolonial” (Keith et al., 2017)

Merespon hal ini Ethiopia melakukan pembangunan GERD yang memiliki tujuan utama untuk menjadi mesin pembangkit listrik. Bendungan ini sepenuhnya menggunakan dana dari masyarakat Ethiopia tanpa bantuan maupun pinjaman asing (Apipudin & Inayah, 2022). Pada tahun 2011 Ethiopia memulai pembangunannya. Melalui pembangunan GERD Ethiopia menunjukkan kekuatannya dengan melawan warisan kolonial, serta pembangunan ini dapat memberikan Ethiopia keuntungan yang dapat mempercepat industrialisasi melalui penyaluran listrik (Asiedu, 2018). Ketika Ethiopia telah resmi melaksanakan proyek pembangunannya, Mesir menolak proyek ini karena berbagai alasan. Mulai dari Ethiopia yang dianggap melakukan proyek ini di tengah konflik *Arab Spring* dan tidak meminta persetujuan dari Mesir hingga pembangunan bendungan ini dianggap dapat menjadi sebuah ancaman terhadap Mesir yang berada di hilir Sungai Nil. Kecemasan ini juga semakin meningkat mengingat Mesir telah masuk ke fase kelangkaan air yang kerap menurun setiap tahun.

Sebagai proyek pembangkit listrik terbesar di Afrika, GERD dapat menghasilkan hingga 6000 MW energi, yang mana hal ini akan memungkinkan Ethiopia untuk menghasilkan listrik untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Setelah menghadapi berbagai konflik internal yang membatasi pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan bendungan ini aspek sosial-ekonomi semakin stabil dan telah memberikan lebih banyak peluang dalam bidang infrastruktur. Durasi pengisian menjadi salah satu alasan utama dalam konflik bendungan GERD. Semakin cepat pengisian air dalam bendungan maka akan menjadi keuntungan bagi

Ethiopia, namun semakin lambat pengisian air dalam bendungan akan memberikan resiko yang lebih kecil bagi Mesir dan Sudan. Campur tangan yang dilakukan oleh Inggris selama masa kolonialisme dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan memberikan dilema geopolitik antara ketiga negara. Meskipun perjanjian-perjanjian ini telah ditandatangani dan menjadi landasan hak historis Mesir dan Sudan dalam mengklaim Sungai Nil, Ethiopia menilai tidak memiliki validitas atas perjanjian ini dan mengabaikan hak-hak Mesir dan Sudan.

Perdebatan mengenai Sungai Nil mendorong negara-negara riparian untuk membentuk sebuah kerja sama dalam pemanfaatan Sungai Nil. Pada tahun 1999, *Nile Basin Initiative* dibentuk dengan harapan dapat memberikan perkenalan mengenai pembagian alokasi air yang adil dan tata kelola Sungai Nil di antara negara-negara riparian. Tetapi pada tahun 2010, Mesir dan Sudan menolak untuk menandatangani perjanjian ini dengan alasan bahwa perjanjian ini dapat mempengaruhi hak-hak historis mereka sebelumnya. Dinamika negosiasi telah menunjukkan bahwa krisis pada Sungai Nil berasal dari hak-hak historis dan pendekatan yang berpusat pada negara. Selain itu, pembentukan perjanjian untuk pengelolaan yang inklusif kerap terhambat karena adanya tegangan geopolitik. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya kekuatan regional yang hegemonik, negara-negara yang lemah, dan banyaknya konflik internal. Meskipun begitu, Ethiopia telah beberapa kali berusaha untuk melakukan kerja sama dengan Mesir dan Sudan demi menyelesaikan ketegangan yang sedang terjadi. Termasuk pembentukan *International Panel of Experts (IPoE)* pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menjadi pemeriksa desain dan rencana pembentukan bendungan.

Dibentuk oleh ketiga negara, IPoE terdiri atas 10 anggota dengan masing dua orang perwakilan dari ketiga negara dan empat ahli lingkungan, bidang sosial ekonomi, teknik bendungan dan spesialis sumber daya air dari Prancis, Afrika Selatan, dan Jerman (Apipudin & Inayah, 2022). IPoE memiliki tujuan utama untuk mengawasi transparansi informasi dan dokumen dari pembangunan GERD demi membangun kepercayaan di antara tiga negara. Kemudian pada tahun 2014 Menteri Mesir dan Ethiopia membentuk komite dengan nama *National Expert Committee* untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap laporan-laporan final dari IPoE dengan melibatkan konsultan dari badan riset perairan dan perusahaan konstruksi bangunan (Apipudin & Inayah, 2022). Persoalan topik pengisian dan pengoperasian bendungan GERD, dibentuk *National Independent Scientific Research Group (NISRG)* dengan tujuan untuk menganalisis mulai dari dampak hingga teknis pengoperasian GERD. Mesir,

melalui NISRG memberikan sebuah proposal berisikan jumlah air yang harus diberikan oleh Ethiopia namun Ethiopia menolak proposal tersebut.

Berangkat dari hal ini, Ethiopia bersama dengan Mesir dan Bank Dunia serta Amerika Serikat sebagai pihak ketiga melaksanakan sebuah dialog kesepakatan mengenai GERD meskipun tetap tidak memperoleh hasil yang baik. Meskipun Mesir dan Ethiopia telah melakukan berbagai perundingan kerja sama dengan melibatkan aktor-aktor internasional sebagai pihak ketiga, hal ini tetap tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi hingga saat ini. Tercatat bahwa negosiasi mengenai GERD telah terhenti sejak tahun 2021 setelah ketiga negara gagal mencapai kesepakatan sebelum periode pengisian bendungan kedua pada Juli 2021 (Apipudin & Inayah, 2022).

KAJIAN LITERATUR

Literatur pertama berjudul “*Environmental Impact of The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Egypt*” yang ditulis oleh Lamiaa Abdallah (Abdallah, Lamiaa, 2021) diawali dengan penjelasan mengenai bendungan GERD yang dibangun sejak 2011 telah memberikan ancaman terhadap pasokan air Mesir. Bendungan GERD yang mencapai luas 1900km dan pasokan air sebanyak 74 miliar meter kubik, dengan dua pembangkit listrik yang terdiri dari 16 turbin francis dan biaya proyek sebesar 5 milyar US Dollar. Tetapi di sisi lain, bendungan GERD juga dapat berdampak pada kehidupan biota laut, tanaman-tanaman air, dan keanekaragaman hayati di wilayah hilir sungai karena adanya perubahan suhu air dan kandungan oksigen. Penulis melanjutkan tulisannya dengan membahas mengenai dampak-dampak dari bendungan GERD dalam beberapa skenario yang berbeda.

Pada skenario pertama, penulis menjelaskan mengenai dampak pada periode pengisian bendungan GERD. Bendungan tersebut membutuhkan waktu selama lima tahun untuk mencapai tingkat air minimum nya. Meskipun hal ini bermanfaat bagi pembangkit listrik tenaga air untuk Ethiopia, tetapi disisi lain aliran sungai ke arah Mesir akan mengalami pengurangan secara berturut-turut. Namun, jika Ethiopia hanya akan mengutamakan kepentingan nasional mereka, proyek bendungan ini dapat mengabaikan kebutuhan air Mesir dan Sudan yang tentunya akan berpotensi untuk memperburuk ketegangan regional yang sudah ada. Pada skenario ketiga, periode operasional pada kekeringan akan dimulai ketika terjadi aliran yang rendah di wilayah cekungan Sungai Nil. Meskipun hal ini belum dapat dipastikan untuk terjadi,

dalam kondisi kekeringan yang parah kecemasan masyarakat sipil Mesir terhadap kekurangan air atau petani miskin dan rentan yang tidak memiliki sumber daya untuk irigasi. Skenario terakhir dimana adanya peristiwa kegagalan dalam bendungan yang dapat terjadi karena lemahnya geologi, cuaca ekstrim, dan serangan militer atau terorisme akan menyebabkan bencana kemanusiaan.

Meskipun negara-negara di hulu sungai memiliki hak atas pemanfaatan sumber airnya, tetapi mereka juga perlu mempertimbangkan dampak negatif yang diterima oleh negara di hilir sungai seperti Mesir dan Sudan. Dalam literatur ini penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi dimana Mesir memerlukan pengembangan rencana yang mencakup prosedur untuk meningkatkan efisiensi distribusi air demi mencegah kebocoran, Mesir juga perlu menggunakan teknologi sensor yang digunakan untuk memantau kelembapan tanah untuk mengoptimalkan irigasi.

Literatur kedua dengan judul *Environmental and Economic Impacts of The Grand Ethiopian Renaissance Dam in Africa* oleh Ahmed Kamara, Mohamed Ahmed, dan Arturo Benavides (Kamara et al., 2022) menelaah dampak terhadap lingkungan dan ekonomi dari pembangunan bendungan GERD dengan berfokus pada proyeksi kerugian dalam alokasi air, lahan pertanian, dan variabel ekonomi makro. Pembangunan bendungan GERD menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap Mesir khususnya terkait keamanan air dan produktivitas pertanian. Para penulis menemukan bahwa diperlukan adanya pengelolaan sumber daya air bersama secara kooperatif di antara negara-negara yang terletak di cekungan Sungai Nil untuk mengurangi dampak buruk dan mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Menyatakan bahwa berdasarkan pada skenario pengisian bendungan selama tiga tahun, alokasi tahunan Mesir diperkirakan akan berkurang hingga lebih dari 50%, pengurangan ketersediaan air ini akan mengakibatkan hilangnya lahan pertanian dan juga berpengaruh pada produktivitas pertanian Mesir dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Turunnya ketersediaan air diperkirakan juga mengarah pada penurunan produksi pangan dalam keseluruhan output sektor pertanian. Ancaman pada sektor pertanian ini diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran nasional, hal ini menekankan kerentanan pertanian Mesir terhadap perubahan alokasi air akibat pembangunan bendungan GERD. Dalam literatur ini, para penulis memperkirakan adanya kerugian PDB per kapita sebesar 8,02% setiap tahunnya dimana penurunan ini setara dengan kerugian total dalam PDB sebesar 26,30 miliar

US Dolar per tahunnya.

Selain itu, kerugian kesejahteraan yang didefinisikan sebagai penurunan konsumen per kapita turun sebesar 12,83% per tahunnya, hal ini akan memperburuk standar hidup masyarakat Mesir karena rendahnya daya beli untuk barang dan jasa. Para penulis menegaskan periode pengisian air yang lebih cepat yaitu dalam waktu tiga tahun akan mengakibatkan dampak yang lebih parah pada ketersediaan air dan produktivitas pertanian, sedangkan pengisian air dalam waktu jangka waktu 10 tahun akan memberikan dampak yang lebih ringan tetapi berkepanjangan. Tulisan ini kemudian menekankan bahwa adanya estimasi yang diberikan pada literatur ini merupakan bagian dari sebuah skenario terburuk dengan asumsi bahwa Mesir tidak menerapkan strategi mitigasi apapun untuk mengatasi dampak dari bendungan GERD. Para penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi mitigasi untuk membantu Mesir dalam mengelola sumber daya air dan menjaga keberlanjutan pertanian.

Literatur ketiga dengan judul Konflik Hidropolitik Sungai Nil Antara Mesir dan Ethiopia karya Apipudin dan Ananda Farie (Apipudin & Inayah, 2022) membahas mengenai akar dari konflik hidropolitik antara Mesir dan Ethiopia. Dimana pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Ethiopia dinilai melanggar perjanjian Nil tahun 1929 dan 1959 dan penolakan oleh Mesir karena dianggap merupakan sebuah ancaman sumber daya alam terhadap negara mereka seperti pengurangan aliran air, perubahan iklim, dan m. Perjanjian ini mengakui hak Sudan atas air untuk perkembangan negara nya sendiri selama hak historis Mesir terhadap Sungai Nil tetap dihormati. Ethiopia, dengan berlandaskan pada *The Nile Basin Initiative*, tetap melanjutkan pembangunan bendungannya meskipun telah ditolak oleh hak veto milik Mesir.

Berawal dari latar belakang konflik GERD, literatur ini kemudian membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong konflik terjadi seperti perjanjian 1929 dan 1959 yang dibentuk tanpa melibatkan Ethiopia. Meskipun perjanjian ini memberikan hak veto kepada Mesir, Ethiopia menolak pengakuan hak ini karena perjanjian ini dianggap tidak mengakui hak-hak negara hulu. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan iklim, dan penurunan volume air, Mesir menghadapi *water stress* yang juga diperparah oleh potensi pengurangan aliran air akibat pembangunan GERD. Mesir menganggap bahwa Ethiopia memanfaatkan situasi konflik *Arab Spring* dan situasi Mesir yang sedang rentan saat itu untuk membangun GERD tanpa melakukan perundingan dan mendapatkan persetujuan dari Mesir. Literatur ini kemudian diakhiri dengan menjelaskan mengenai upaya-upaya yang telah

dilakukan seperti inisiatif diplomatik berupa pembentukan *International Panel of Expert* (IPoE) pada 2012 dengan tujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dampak dari pembangunan GERD.

Dilanjut pada tahun 2014 dengan membentuk *Tripartite National Committee* dan penandatanganan *Declaration of Principles* (DoP) pada 2015 yang menyatakan komitmen untuk kerja sama dan penyelesaian konflik. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian konflik, Mesir dan Sudan menuntut jaminan keamanan air dan Ethiopia yang tetap menolak adanya intervensi pihak ketiga seperti Bank Dunia dan Amerika Serikat yang dinilai memihak Mesir. Meskipun tidak memiliki persetujuan dari Mesir, Ethiopia tetap melakukan pembangunan dan pengisian air secara sepihak pada tahun 2020 dan 2021 yang memicu protes besar-besaran oleh Mesir dan Sudan. Mesir meminta intervensi dari PBB, menyebut tindakan Ethiopia sebagai ancaman perdamaian internasional, sementara Ethiopia membela haknya untuk mengelola sumber daya air tanpa persetujuan Mesir.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa analisis dokumen baik dari penelitian-penelitian sebelumnya atau dokumen yang berasal dari situs-situs formal untuk membahas mengenai bagaimana teori keamanan lingkungan mengkolaborasikan dimensi ketimpangan sekunder dan masyarakat adat dalam melihat dampak lingkungan terhadap pembangunan GERD serta bagaimana upaya Ethiopia dan Mesir dalam mengedepankan kepentingan nasional masing-masing. Serta konsekuensi politik dan stabilitas regional jika proyek pembangunan GERD gagal maupun tetap dilanjutkan, mengkaji risiko ketidakstabilan politik di Ethiopia jika kebutuhan air dan energi tidak terpenuhi, serta dampak ekologi dan sosial dari pembangunan GERD terhadap tiga negara yang dilihat dari perspektif kritik lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan air sungai lintas batas menjadi salah satu tantangan paling kompleks pada abad ini. Penggabungan antara proyek infrastruktur seperti bendungan, kebutuhan air untuk pertanian intensif, dampak perubahan iklim, dan tekanan akibat pertumbuhan populasi serta pembangunan di negara-negara terkait dapat memicu konflik signifikan di masa depan. Sebagai

contoh, pembangunan Bendungan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) di Sungai Nil telah menimbulkan ketegangan antara Ethiopia, Sudan, dan Mesir, karena kekhawatiran akan distribusi air, keamanan pangan, dan stabilitas regional, menjadikannya salah satu isu konflik air lintas batas yang paling relevan saat ini. Tingginya kelangkaan air dan meningkatnya permintaan atas sumber daya tersebut menjadi alasan yang umum bagi negara-negara untuk berkonflik.

Tingkat kerusakan yang akan disebabkan oleh bendungan GERD tergantung pada periode waktu yang dibutuhkan oleh Ethiopia untuk mengisi air pada bendungan tersebut. Dengan periode 2,5 tahun untuk pengisian waduk dapat memberikan dampak pengurangan aliran air ke Mesir sebesar 55%. (Keith et al., 2017). Tetapi dengan kecepatan ini akan sangat bermanfaat bagi mesin pembangkit listrik milik Ethiopia. Hal ini dikarenakan tekanan air yang tinggi dapat mengoptimalkan perputaran turbin listrik milik Ethiopia. Penurunan tekanan air pengisian bendungan GERD lebih dari 10% dapat memberikan dampak yang minimal terhadap aliran sungai ke Meri hingga 14% selama lima tahun berturut-turut (Zhang et al., 2015). Dilansir dari <http://www.worldometers.info> didukung oleh jumlah populasi Mesir sebanyak lebih dari 118 juta, kelangkaan air dapat memicu adanya penurunan hasil panen, krisis pangan, dan migrasi paksa para petani dan masyarakat. Selain krisis air, pembangunan bendungan ini dapat memperparah perubahan iklim yang terjadi. Kenaikan suhu rata-rata di Afrika mengarahkan pada intensitas kekeringan dan potensi pola hujan yang tidak menentu.

Perubahan iklim yang dialami oleh negara-negara di cekungan Sungai Nil fenomena hidrometeorologi seperti kekeringan dan gelombang panas, hal ini juga dapat memperburuk ketidakamanan regional Afrika. Perubahan iklim yang terjadi secara signifikan dapat mengubah dinamika air di cekungan Sungai Nil dalam waktu 7 tahun bersamaan dengan terpenuhinya bendungan GERD. Perubahan iklim ini dapat mengarahkan pada perubahan siklus cuaca yang lebih ekstrim dari waktu ke waktu, penguapan air dalam jumlah yang besar akan menyebabkan jumlah uap air meningkat dan mendatangkan hujan yang terus menerus dan intens pada tahun-tahun mendatang. Negara Mesir, secara spesifik, akan mengalami penurunan kualitas air dan naiknya permukaan air laut ke dalam air sungai Delta Nil menyebabkan tidak dapat digunakan bagi masyarakat Mesir (Apipudin & Inayah, 2022). Sungai ini menjadi salah satu dari tiga titik krusial atas kenaikan permukaan air laut.

Pertumbuhan penduduk Mesir yang meningkat menjadi ancaman bagi ketersediaan air bersih, diperkirakan Mesir akan mengalami kekurangan air bersih pada tahun 2025. Hal ini

menjadi tanda bahwa Mesir telah masuk ke fenomena *water stress* yang mengacu pada sebuah fenomena dimana terjadi kelangkaan terhadap air bersih dan permintaan air yang lebih tinggi dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Beberapa studi juga telah memprediksi bahwa Mesir akan mengalami banjir, menurunnya kadar garam dalam tanah, dan kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan Mesir tidak dapat dihuni dalam rentang waktu beberapa tahun kedepan (Apipudin & Inayah, 2022). Ancaman terhadap eksistensi negara, juga dirasakan oleh negara-negara hulu yang mengarahkan mereka untuk mengambil langkah politik. Negara-negara hulu bersikeras atas pengoptimalan air berdasarkan prinsip *equitable use* yang juga pernah dilakukan pada perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh negara-negara cekungan Sungai Nil pada tahun 2010 lalu.

Sengketa GERD memiliki pengaruh pada kerja sama regional Afrika, hal ini mengalihkan perhatian dari inisiatif kerja sama terkait pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan atas lingkungan dalam cekungan Sungai Nil. Pergeseran perhatian ini berdampak pada kerugian terhadap kemampuan regional Afrika untuk mengatasi konflik ini secara efektif. Kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik ini menyoroti perlunya pendekatan yang adil dengan mempertimbangkan implikasi dari bendungan maupun tantangan yang bersifat berkelanjutan yang terjadi di cekungan Sungai Nil. Upaya diplomatik dan penyelesaian konflik yang digunakan dianggap krusial dalam mencegah meningkatnya intensitas konflik dan untuk mempromosikan stabilitas regional.

Konflik GERD menjadi representasi kompleks dari dinamika geopolitik kontemporer yang didalamnya mencakup kedaulatan akan sumber daya, perubahan iklim, dan keamanan ekologis. Mediasi internasional telah menyediakan wadah netral dan pihak yang tidak condong ke suatu sisi untuk terlibat dalam negosiasi yang konstruktif. Para mediator yang terlibat merupakan individu yang ahli pada bidangnya dan dengan pengalaman vital untuk memfasilitasi diskusi dan memberikan usulan solusi potensial. Keterlibatan Uni Afrika dalam konflik GERD dan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan pentingnya konflik ini bagi komunitas global untuk penyelesaian konflik secara diplomatik (Okech & Wasonga, 2023). Beberapa peneliti menganggap *Declaration of Principle* yang dibuat oleh Mesir, Ethiopia, dan Sudan menjadi sumber dari permasalahan yang lebih besar. Penandatanganan ini menjadi dasar izin Ethiopia untuk melanjutkan pembangunan GERD tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Mesir dan Sudan.

Ethiopia, Mesir, dan Sudan telah terlibat dalam beberapa negosiasi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik ini. *Declaration of Principle* yang ditandatangani oleh ketiga negara pada tahun 2015 dianggap tidak sah karena bersifat luas dan tidak ditegakkan. Mesir dan Sudan telah meminta Ethiopia untuk menghentikan pembangunan hingga sebuah kesepakatan telah dicapai, namun Ethiopia menolak dengan alasan bahwa bendungan ini sangat vital bagi pertumbuhan ekonominya dan mereka memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, dalam hal ini air, untuk kepentingan nasional negara mereka. Meskipun upaya-upaya diplomasi telah dilakukan, penyelesaian konflik GERD dinilai rumit karena ketidaksepakatan yang kerap berlangsung antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan. Menyelaraskan kepentingan-kepentingan dari negara di tepi Sungai Nil menjadi sebuah tantangan tersendiri dari para mediator untuk menemukan kesepakatan yang komprehensif mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan GERD.

Sebagai pihak ketiga dalam negosiasi, Mesir mengajak Amerika Serikat yang diwakili oleh Steven Mnuchin dan Bank Dunia yang diwakili oleh David Malpass untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai kesepakatan mengenai bendungan GERD. Negosiasi dimulai pada tahun 2019 dengan nama *Washington Road* dengan penetapan komitmen negosiasi dan pihak ketiga pada 6 November 2019. Negosiasi dilanjutkan pada bulan yang sama dengan melakukan pembahasan mengenai kesepakatan durasi pengisian bendungan dan kesepakatan finalisasi negosiasi pada 15 Januari 2020. Kemudian pada 13 Januari negosiasi berhasil menghasilkan enam poin draft kesepakatan. Ketiga negara telah berhasil memperoleh kesepakatan mengenai pengisian, pengoperasian, dan mekanisme penyelesaian konflik. Namun, pada saat penandatanganan kesepakatan akhir Ethiopia memilih untuk tidak hadir (Herdianti & Susiatiningsih, 2023).

Pada awal negosiasi pihak ketiga telah ditentukan akan berperan hanya sebagai pengamat selama negosiasi berlangsung, namun pada tahap akhir pihak-pihak ketiga mengubah perannya menjadi perumus kesepakatan. Atas dasar kepentingan geopolitik dengan Afrika Timur dan Timur Tengah, Amerika Serikat merasa terdesak untuk mengambil peran yang lebih aktif dengan memberikan usulan draft kesepakatan untuk mendorong kemajuan negosiasi. Pemerintah Ethiopia menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan waktu untuk melakukan perundingan dalam negeri. Ethiopia juga menolak mengakui hasil akhir dari negosiasi yang telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan tersebut, menyatakan bahwa hasil akhir tersebut

tidak selaras dengan diskusi teknis dan hukum dari tiga negara. Alhasil negosiasi ini mengalami kegagalan karena tidak dapat memberikan hasil akhir.

Berdasarkan teori kegagalan negosiasi internasional, diskusi-diskusi yang dilakukan tidak mampu memberikan kesepakatan karena adanya kegagalan dalam merumuskan solusi permasalahan dan hasil yang adil bagi semua pihak. Hasil kesepakatan dinilai merugikan Ethiopia secara sepihak. Hal ini mengarah pada Ethiopia yang beranggapan bahwa pihak ketiga, dalam kasus ini, Amerika Serikat, memihak kepada Mesir yang diuntungkan oleh kebijakan mitigasi kekeringan. Setelah penolakan atas keputusan ini, Amerika Serikat ekshibisi memberikan tekanan kepada Ethiopia dengan memotong bantuan luar negeri kepada Ethiopia hingga Ethiopia menyetujui keputusan pada negosiasi *Washington Road*. Tindakan ini telah memberikan indikasi keberpihakan Amerika terhadap Mesir, yang mana hal ini melanggar prinsip teori resolusi konflik dimana pihak ketiga hanya berperan sebagai pengawas tanpa berpihak pada sisi manapun. Rencana yang diambil oleh Amerika Serikat selain telah melanggar perannya sebagai pihak mediator, juga telah meningkatkan rasa skeptisisme Ethiopia terhadap Amerika dalam upaya resolusi konflik GERD. Kemungkinan berlanjutnya negosiasi ini juga semakin menipis karena kebijakan yang diterapkan oleh Amerika terhadap Ethiopia.

Selain aktor-aktor internasional, Uni Afrika juga memainkan perannya dalam mengupayakan solusi komprehensif. Uni Afrika telah mengakui adanya potensi ketidakstabilan konflik GERD ini terhadap kawasan regional. Uni Afrika telah menyediakan platform untuk melakukan dialog trilateral di antara para pemimpin Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Contohnya pada pertemuan KTT Uni Afrika ke 30 yang diselenggarakan di ibu kota Ethiopia yaitu Addis Ababa pada Januari 2018. Para peneliti memberikan saran Uni Afrika untuk berperan sebagai pengawas yang bersifat netral untuk memastikan pengimplementasian kesepakatan trilateral (Asiedu, 2018). Berdasarkan pada kegagalan perjanjian sebelumnya contohnya kerangka kerja Khartoum tahun 2015, Uni Afrika sebaiknya hanya mengambil peran sebagai pengamat dan pendorong kerja sama yang efektif untuk mencegah konflik semakin memuncak.

Pertemuan telah menghasilkan sebuah kesepakatan antara ketiga pemimpin untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi ketegangan regional. Kesepakatan ini mencakup pembentukan dana pengembangan trilateral dan rencana pertemuan tahunan untuk melakukan diskusi bersama dengan penggunaan sumber daya air dan pengoperasian GERD sebagai fokus utama. Para pemimpin dari ketiga negara sepakat untuk menetapkan menteri bagian sumber daya alam dan

energi dari masing-masing negara untuk menyusun laporan yang berisikan resolusi untuk menyelesaikan kekhawatiran bendungan GERD. Kesepakatan yang dihasilkan juga mencakup komitmen ketiga negara untuk mengadakan sebuah *annual meeting* untuk membahas kepentingan nasional masing-masing negara dan untuk mendorong adanya keputusan yang kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik, keamanan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pembangunan GERD oleh Ethiopia untuk mendukung industrialisasi dan kebutuhan energi bertentangan dengan kepentingan Mesir dan Sudan yang bergantung pada Sungai Nil untuk keamanan air, pertanian, dan ketahanan pangan. Perjanjian kolonial seperti Nile Waters Agreement 1959, yang memberikan hak veto kepada Mesir, dianggap tidak sah oleh Ethiopia, memicu ketegangan lebih lanjut. Upaya diplomasi melalui *Nile Basin Initiative*, *International Panel of Experts*, *Declaration of Principles 2015*, serta mediasi oleh Uni Afrika, Amerika Serikat, dan Bank Dunia belum berhasil mencapai kesepakatan yang komprehensif karena ketidaksepakatan mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan. Dampak lingkungan GERD, seperti pengurangan aliran air hingga 55% ke Mesir, ancaman terhadap biodiversitas, dan meningkatnya perubahan iklim, memperburuk *water stress* di Mesir dan meningkatkan risiko krisis pangan serta ketidakstabilan regional. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan pengelolaan air yang adil dan kooperatif, dengan mediasi netral, untuk menyeimbangkan kepentingan nasional ketiga negara dan mendorong stabilitas regional di cekungan Sungai Nil.

DAFTAR PUSTAKA

- Apipudin, & Inayah, A. F. (2022). KONFLIK HIDROPOLITIK SUNGAI NIL ANTARA MESIR DAN ETHIOPIA. *MULTIKULTURA: Jurnal Lintas Budaya*, 1(3), 563-570. 10.7454/multikultura.v1i3.1111
- Asiedu, M. (2018). The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD):: Ethiopia, Egypt and Sudan push for cooperation. *Global Political Trends Center (GPoT)*.

<http://www.jstor.org/stable/resrep14135>

- Herdianti, B. N., & Susiatiningsih, H. (2023). Sebuah Ironi: Kegagalan Amerika Serikat dan Bank Dunia dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Bendungan GERD. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2), 304-322. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49712>
- Keith, B., & Horton, R. M. (2016). Considerations in managing the fill rate of the Grand Ethiopian Renaissance Dam Reservoir using a system dynamics approach. *Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology*, 14(1), 33-43. <https://doi.org/10.1177/1548512916680780>
- Mbaku, J. M. (2020, August 5). *The controversy over the Grand Ethiopian Renaissance Dam*. Brookings Institution. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.brookings.edu/articles/the-controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/>
- Okech, C. O., & Wasonga, J. (2023). The Impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Conflict on Regional Cooperation, Sustainable Development, and Conflict Resolution in Africa. *Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS)*, 7(12), 5-14.
- Purnomo, M. A. (2022). Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Parahyangan Center for International Studies*, 18(1), 55-73. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73>
- Ramadhan, M. F. R. (2024). THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM AND THE SHIFTING THE GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM AND THE SHIFTING BALANCE OF POWER IN THE HORN OF AFRICA. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 26(2), 1-24. [10.7454/global.v26i2.1327](https://doi.org/10.7454/global.v26i2.1327)
- Toufexi, C. (2025). The GERD dispute and the geopolitics of the Nile basi. *Middle East Flashpoint Centre for Mediterranean, Middle East & Islamic Studies*, 2-4.
- Zhang, Y., Block, P., & Hammond, M. J. (2015). Ethiopia's Grand Renaissance Dam: Implications for Downstream Riparian Countries. *ASCA Library*, 141(9), 1-10. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0000520](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000520)